

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA  
BARAT NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN  
TATA CARA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK  
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

**OLEH :**

**Wulandari H**

**1510842007**



**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2020**

## ABSTRAK

**Wulandari H, No BP : 1510842007, Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal di Kabupaten Solok Selatan, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, 2019. Dibimbing oleh : Wewen Kusumi Rahayu, S. Ap, M.Si dan Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM. Skripsi ini terdiri dari 205 halaman dengan referensi 13 buku teori, 5 buku metode, 4 jurnal, dan 15 Dokumen.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal di Kabupaten Solok Selatan. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2012 bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan antara Penanam Modal dan Pemilik Tanah Ulayat, dan memberikan gambaran umum serta kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan penanaman modal. Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah yang memiliki jumlah realisasi investasi yang memanfaatkan tanah ulayat untuk penanaman modal paling banyak pada tahun 2018 dibandingkan Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Barat dan menjadi salah satu daerah incaran bagi penanaman modal. Akan tetapi, dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 di Kabupaten Solok Selatan masih terdapat beberapa kendala salah satunya ketidaktahuan pemilik tanah ulayat terkait Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 sehingga masih menimbulkan ketidakadilan antara Kelompok Sasaran. Fenomena ini menunjukkan perlu dilihat bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 Tahun 2012 di Kabupaten Solok Selatan.

Penelitian ini menggunakan Teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta disposisi implementor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif- deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 di Kabupaten Solok Selatan belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu tidak adanya standar tertentu bagi implementor sebagai acuan dalam menjalankan kebijakan, kurangnya pemahaman implementor terhadap ketentuan yang diamanatkan melalui kebijakan, dan beberapa faktor lainnya.

**Kata Kunci : Implementasi, Penanam Modal, Penguasa atau pemilik tanah ulayat**

## ABSTRACT

**Wulandari H, No BP: 1510842007, Implementation of West Sumatra Governor Regulation Number 21 of 2012 concerning Guidelines and Procedures for Utilizing Customary Land for Investment in South Solok Regency, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2019. Supervised by: Wewen Kusumi Rahayu, S. Ap, M.Sc and Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM. This thesis consists of 205 pages with references to 13 theory books, 5 method books, 4 journals, and 15 documents.**

This study aims to describe the process of implementing the Governor of West Sumatra Regulation No. 21 of 2012 concerning Guidelines and Procedures for Utilizing Customary Land for Investment in South Solok Regency. West Sumatra Governor Regulation No. 21 of 2012 aims to create mutually beneficial cooperation between Investors and Communal Land Owners, and provide an overview and legal certainty in the use of communal land for investment activities. South Solok Regency is the region that has the most investment realization using ulayat land for investment in 2018 compared to regencies / cities in West Sumatra and has become one of the targeted areas for investment. However, in the implementation of the West Sumatra Governor Regulation No. 21 of 2012 in South Solok Regency there are still several obstacles, one of which is ignorance of customary landowners related to the West Sumatra Governor Regulation No. 21 of 2012 so that it still causes injustice between the Target Groups. This phenomenon shows that it needs to be seen how the implementation of the West Sumatra Governor Regulation Number 21 of 2012 in South Solok Regency.

This research uses Donald Van Meter and Carl Van Horn Theory which consists of six variables, namely policy standards and targets, resources, communication between organizations, characteristics of implementing agencies, social, economic, and political conditions as well as implementor dispositions. The method used in this research is qualitative-descriptive. Data collection techniques are done by interview and documentation.

The results of this study conclude that the implementation of the West Sumatra Governor Regulation No. 21 of 2012 in South Solok Regency has not been going well. This is caused by several things, namely the absence of certain standards for the implementor as a reference in carrying out the policy, the lack of understanding of the implementor of the provisions mandated through the policy, and several other factors.

**Keywords: Implementation, investors, authorities or owners of communal land**